

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan manusia merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kemajuan suatu negara, termasuk Indonesia (Sari 2018). Menurut Sari Meskipun Indonesia telah mengalami Pembangunan manusia yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, tantangan dalam pembangunan manusia tetap menjadi isu yang mendesak. Fenomena umum yang terlihat adalah tingginya angka pengangguran dan kemiskinan, yang menunjukkan bahwa Pembangunan manusia belum sepenuhnya berdampak positif pada kualitas hidup masyarakat.

Kualitas hidup masyarakat merupakan hal yang dimaknai secara umum yang terdiri dari beberapa komponen dan dimensi dasar yang berhubungan dengan kesehatan diantaranya keadaan dan fungsi fisik, keadaan psikologis, fungsi sosial, dan penyakit, serta perawatannya (Wati & Purba 2017). Diener et al. (1999 hlm 23) mendefinisikan kualitas hidup sebagai tingkat kesejahteraan subjektif berdasarkan kepuasan hidup secara keseluruhan, yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan psikologis. Costanza et al. (2007) menjelaskan bahwa kualitas hidup mencerminkan tingkat kepuasan individu terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan mereka, serta bagaimana faktor-faktor tersebut berkontribusi terhadap kesejahteraan subjektif. Sementara itu, WHO *World Health Organization* (2012 hlm 23) mendeskripsikan kualitas hidup sebagai persepsi individu terhadap posisi mereka dalam kehidupan, terkait dengan budaya, sistem nilai, tujuan, harapan, dan konteks lingkungan tempat tinggal mereka. Deci & Ryan (2000 hlm 227-229) dalam *Self-Determination Theory* menekankan bahwa kualitas hidup berkaitan dengan pemenuhan tiga kebutuhan psikologis dasar, yaitu kompetensi, keterhubungan sosial (*relatedness*), dan otonomi. ketiga kebutuhan ini berperan dalam membentuk kesejahteraan individu serta meningkatkan motivasi dan kepuasan hidup. Dengan demikian, peningkatan kualitas hidup masyarakat menjadi

bagian integral dari strategi pembangunan manusia yang lebih luas, karena kesejahteraan individu merupakan tujuan utama dari kebijakan pembangunan.

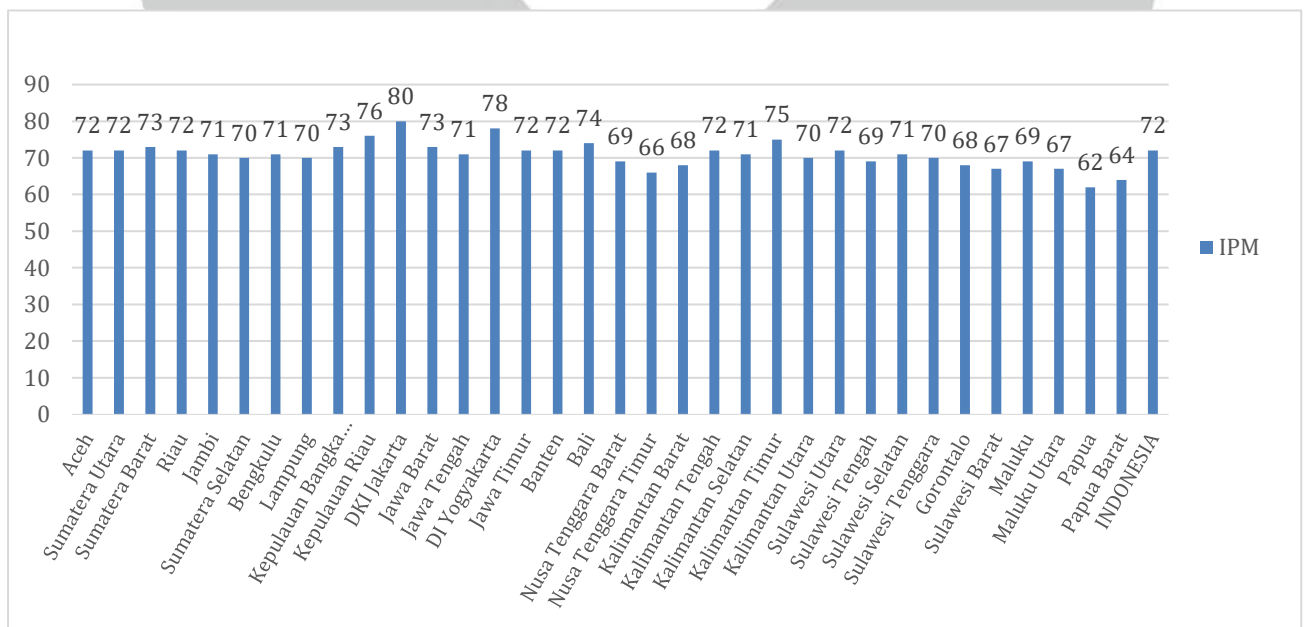
Selain kualitas hidup, pembangunan manusia juga sangat erat kaitannya dengan standar hidup layak *decent standard of living* Sen (1999 hlm 50) menyatakan bahwa standar hidup layak mencakup kebebasan individu dalam mengakses kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan untuk mencapai kehidupan yang bermakna serta memiliki peluang yang setara dalam berbagai aspek kehidupan. Nussbaum et al. (2000 hlm 65) menambahkan bahwa standar hidup layak tidak hanya mencakup kebutuhan ekonomi, tetapi juga hak-hak dasar seperti akses terhadap lingkungan yang bersih dan aman, yang merupakan bagian dari kebijakan pembangunan berkelanjutan. Sementara itu, World Bank (2018 hlm 89) menjelaskan bahwa standar hidup layak mencerminkan kemampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar yang memungkinkan mereka untuk hidup dengan martabat dan berkontribusi secara aktif dalam masyarakat. Menurut UNDP *United Development Program* (2019 hlm 98) menekankan bahwa standar hidup layak merupakan aspek penting dalam kebijakan pembangunan manusia yang berkelanjutan, yang harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan publik guna mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial.

Pembangunan manusia merupakan aspek fundamental dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing suatu negara (Todaro & Smith 2015). Menurut UNDP (2019 hlm 5) mendefinisikan pembangunan manusia sebagai proses memperluas pilihan manusia dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Sen (1999 hlm 45) menekankan bahwa pembangunan manusia harus berfokus pada peningkatan kapabilitas individu agar mereka dapat menjalani kehidupan yang mereka anggap bernilai dan memiliki kebebasan dalam menentukan pilihan hidup mereka. Sementara itu, Hildebrand (1995 hlm 52) menyatakan bahwa pembangunan manusia adalah tujuan akhir dari pembangunan ekonomi, bukan sekadar alat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi semata. Todaro & Smith (2015 hlm 85) menambahkan bahwa pembangunan manusia tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan, tetapi juga pada

peningkatan kualitas sumber daya manusia secara menyeluruh, yang mencakup aspek sosial, politik, dan budaya.

Mengukur keberhasilan pembangunan manusia indikator yang tepat diukur menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diperkenalkan oleh Haq (1990 hlm 88) IPM mengombinasikan tiga indikator utama, yaitu angka harapan hidup sebagai indikator kesehatan, rata-rata lama sekolah sebagai indikator pendidikan, dan pendapatan per kapita sebagai indikator standar hidup layak UNDP (2019 hlm 15). Dengan adanya IPM, evaluasi terhadap pembangunan manusia dapat dilakukan dengan lebih komprehensif dan tidak hanya bergantung pada indikator ekonomi seperti *Product Domestic Bruto* (PDB).

Untuk mengatasi ketimpangan ini, diperlukan kajian lebih lanjut kebijakan anggaran pendidikan dan kesehatan dalam meningkatkan pembangunan manusia di tingkat regional. Oleh karena itu, penelitian ini untuk mengetahui bagaimana alokasi anggaran di kedua sektor tersebut dapat memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat dan standar hidup layak di berbagai provinsi Indonesia. Berikut adalah gambar indeks pembangunan manusia di Indonesia selama kurun waktu 8 tahun terakhir.



Gambar 1. 1 Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia Tahun 2016-2023

Baharudin Akbar, 2025

PENGARUH ANGGARAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN TERHADAP PEMBANGUNAN MANUSIA DI INDONESIA PERIODE 2016-2023

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS 2024) Data diolah

Berdasarkan Gambar 1.1, terlihat bahwa capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia pada periode rata-rata tahun 2016–2023 menunjukkan variasi dan fluktuasi yang cukup jelas antarprovinsi selama periode 2016–2023. Berdasarkan data rata-rata IPM nasional, hanya terdapat satu provinsi yang masuk dalam kategori tinggi ($IPM \geq 80$), yaitu DKI Jakarta. Hal ini menandakan bahwa capaian pembangunan manusia yang optimal masih sangat terpusat di wilayah ibu kota negara. Sebaliknya, mayoritas provinsi di Indonesia, yaitu sekitar 28 provinsi, berada dalam kategori tinggi ($IPM 70–79$). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah telah mencapai taraf hidup yang relatif baik, khususnya dalam dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Namun demikian, angka ini belum sepenuhnya merata karena masih terdapat ketertinggalan yang cukup mencolok di beberapa wilayah lain.

Terdapat setidaknya 9 provinsi yang berada dalam kategori sedang ($IPM 60–69$), yaitu Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Papua Barat, dan Papua Pegunungan. Sementara itu, Papua dan Papua Pegunungan mencatatkan nilai IPM di bawah 65, yang mendekati ambang batas kategori rendah ($IPM < 60$). Kondisi ini menandakan adanya disparitas regional yang tinggi dalam capaian pembangunan manusia di Indonesia. Perbedaan kategori IPM ini mengindikasikan adanya gap kualitas hidup antara provinsi satu dengan lainnya, yang mencerminkan ketimpangan dalam akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat. Ketimpangan ini menjadi tantangan serius dalam pembangunan nasional yang inklusif. Oleh karena itu, diperlukan intervensi kebijakan yang bersifat afirmatif dari pemerintah pusat guna mendorong peningkatan IPM di provinsi-provinsi dengan capaian rendah dan sedang.

Menurut laporan dari UNDP (2020), perbedaan capaian pembangunan manusia antarwilayah dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti tingkat investasi dalam sektor pendidikan dan kesehatan, kondisi infrastruktur, serta distribusi sumber daya yang belum merata. Misalnya, provinsi dengan pusat

ekonomi yang berkembang pesat, seperti DKI Jakarta, memiliki akses lebih baik terhadap pendidikan berkualitas, layanan kesehatan modern, serta peluang kerja yang lebih luas. Sebaliknya, provinsi dengan IPM lebih rendah sering kali menghadapi kendala dalam pengembangan sumber daya manusia akibat kurangnya fasilitas pendidikan yang memadai, keterbatasan layanan kesehatan, serta lapangan pekerjaan yang masih terbatas. Salah satu aspek penting dalam mendorong pembangunan manusia adalah alokasi anggaran pendidikan, karena pendidikan berperan strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai fondasi pembangunan nasional (Bappenas 2020).

Pembangunan manusia merupakan aspek krusial dalam mencapai kemajuan sosial dan ekonomi suatu negara. Dalam konteks global yang terus berubah, tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan kualitas hidup, pendidikan, dan kesehatan masyarakat semakin kompleks. Penelitian mengenai masalah ini sangat mendesak, mengingat bahwa pembangunan manusia tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup individu dan masyarakat secara keseluruhan.

Penelitian ini didasarkan pada teori *Human Capital*, Hildebrand (1995). Yang menekankan bahwa investasi di bidang pendidikan dan kesehatan berperan penting dalam meningkatkan produktivitas individu. Peningkatan kualitas sumber daya manusia ini pada akhirnya akan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Di penelitian terdahulu, Pengaruh pendidikan dan kesehatan terhadap pembangunan manusia masih menunjukkan temuan yang tidak konsisten, baik dari segi arah hubungan maupun signifikansi pengaruhnya. Beberapa studi menunjukkan bahwa anggaran pendidikan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sementara anggaran kesehatan justru tidak berpengaruh nyata. Hal ini ditemukan dalam penelitian oleh Sijabat et al. (2022) yang menekankan bahwa sektor pendidikan memainkan peran penting dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat, sedangkan sektor kesehatan tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Penelitian Sanggelorang et al. (2015) bahkan menyatakan bahwa pengeluaran pendidikan berpengaruh positif dan

signifikan terhadap IPM, sementara pengeluaran kesehatan cenderung negatif dan tidak signifikan.

Namun demikian, temuan tersebut bertolak belakang dengan sejumlah penelitian lainnya yang justru menyimpulkan bahwa pengeluaran kesehatan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, sementara pengeluaran pendidikan tidak memberikan dampak berarti. Hal ini diperkuat oleh studi Mahuze et al. (2022), Lengkong et al. (2019), Susilawati & Syukri (2023) yang menyatakan bahwa belanja pendidikan belum mampu mendorong peningkatan IPM secara signifikan, sedangkan sektor kesehatan terbukti memiliki kontribusi yang lebih besar dalam pembangunan manusia. Penelitian oleh Soleha et al. (2017), Susanti & Hidayat (2020), serta Andiny & Sari (2018) juga menunjukkan temuan serupa, menegaskan pentingnya sektor kesehatan sebagai determinan utama dalam peningkatan IPM.

Selain itu, terdapat pula penelitian yang menemukan bahwa kedua sektor pendidikan dan Kesehatan secara bersamaan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Studi yang dilakukan oleh Setiawan et al. (2020), Mahendra (2020), dan Shazia Kousar et al. (2023) menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah di kedua sektor tersebut saling melengkapi dalam mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat. Hasil ini memperkuat pendekatan teoritis bahwa pembangunan manusia harus bersifat holistik dan tidak bisa hanya bergantung pada satu sektor saja.

Di sisi lain, terdapat pula hasil penelitian yang menyimpang dari kecenderungan umum, yaitu pengeluaran kesehatan justru memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM, seperti yang ditemukan dalam studi Palenewen et al. (2018). Hal ini menunjukkan bahwa besarnya alokasi anggaran tidak serta-merta menjamin peningkatan kualitas pembangunan manusia apabila tidak disertai dengan tata kelola dan efektivitas belanja yang baik.

Kesenjangan empiris ini menjadi salah satu alasan penting bagi peneliti untuk melakukan kajian lebih lanjut mengenai pengaruh pengeluaran pendidikan dan kesehatan terhadap pembangunan manusia, khususnya di Indonesia, dengan

wilayah dan waktu yang lebih terkini. Perbedaan karakteristik fiskal, sosial, dan kelembagaan di masing-masing daerah menjadi faktor yang mungkin menjelaskan ketidakkonsistenan temuan-temuan tersebut.

Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di suatu daerah mencerminkan masih lemahnya kualitas hidup masyarakat, terutama dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan daya beli. Ketika IPM berada di bawah standar nasional, hal ini menandakan bahwa penduduk di wilayah tersebut menghadapi keterbatasan dalam memperoleh pendidikan yang layak, layanan kesehatan yang memadai, serta kemampuan ekonomi yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kondisi ini berdampak langsung pada rendahnya produktivitas tenaga kerja, meningkatnya angka kemiskinan, dan memburuknya kualitas sumber daya manusia, yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperbesar kesenjangan antarwilayah.

Dari perspektif pembangunan nasional, IPM yang rendah dapat menjadi penghambat utama dalam pencapaian target pembangunan jangka Panjang. Ketimpangan IPM antardaerah, jika dibiarkan, dapat menyebabkan disparitas struktural, memicu urbanisasi berlebih, serta menciptakan ketidakadilan sosial dan ekonomi. Lebih jauh, wilayah dengan IPM rendah juga rentan terhadap masalah sosial lainnya, seperti pengangguran, kriminalitas, gizi buruk, dan rendahnya partisipasi dalam pembangunan politik dan ekonomi.

Oleh karena itu, meningkatkan IPM merupakan suatu urgensi strategis dan multidimensional, karena menyangkut keberhasilan bangsa dalam menciptakan masyarakat yang sehat, cerdas, dan produktif. Pemerintah perlu memfokuskan kebijakan pada efektivitas pengeluaran sektor pendidikan dan kesehatan sebagai dua fondasi utama pembangunan manusia. Tanpa intervensi yang tepat dan terarah, maka bonus demografi yang dimiliki Indonesia akan berubah menjadi beban demografi, mengingat kualitas penduduk yang rendah tidak mampu berkontribusi secara optimal terhadap pembangunan nasional.

Penelitian ini memiliki kebaruan karena menggunakan metode *Autoregressive Distributed Lag (ARDL) Panel/PMG* dalam menganalisis pengaruh

anggaran pendidikan dan kesehatan terhadap pembangunan manusia di Indonesia. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya menggunakan regresi data panel (*Fixed Effect, Random Effect, atau OLS*), pendekatan ARDL memungkinkan untuk membedakan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Dengan demikian, penelitian ini memberikan perspektif baru yang lebih komprehensif dalam memahami efektivitas belanja pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan terhadap pembangunan manusia.

Berdasarkan paparan di atas, diperlukan analisis lebih lanjut untuk memahami bagaimana alokasi anggaran di kedua sektor ini benar-benar dapat berkontribusi terhadap pembangunan manusia. Selain itu, penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa di Indonesia, peningkatan anggaran di sektor pendidikan dan kesehatan belum tentu menghasilkan peningkatan yang signifikan dalam IPM, dikarenakan faktor-faktor struktural seperti efisiensi penggunaan anggaran dan kebijakan distribusi sumber daya yang belum optimal. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Anggaran Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Pembangunan Manusia Di Indonesia”**

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran umum anggaran Pendidikan, anggaran Kesehatan, dan Pembangunan Manusia di Indonesia Periode 2016-2023?
2. Apakah anggaran Pendidikan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Periode 2016-2023?
3. Apakah anggaran Kesehatan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Periode 2016-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan:

1. Untuk mengetahui gambaran umum anggaran Pendidikan, anggaran Kesehatan, dan Pembangunan manusia di Indonesia Periode 2016-2023

2. Untuk mengetahui apakah anggaran Pendidikan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Periode 2016-2023.
3. Untuk mengetahui apakah anggaran Kesehatan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Periode 2016-2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dari segi ilmiah, penelitian ini diharapkan dan untuk membuktikan bahwa teori pembangunan manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Secara khusus yaitu, tingkat pendidikan dan kesehatan. Penelitian ini juga mengharapkan setiap variabel saling terkait untuk mendorong pembangunan manusia. Sebagai tolak ukur yang dapat digunakan dalam penelitian lainnya yang serupa.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi mahasiswa penelitian ini bermanfaat untuk memperluas pemahaman tentang bagaimana pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan berkontribusi terhadap pembangunan manusia. Selain itu, penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran mahasiswa mengenai pentingnya alokasi anggaran yang efektif dalam mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- b. Bagi institusi, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan kurikulum atau kajian akademik yang menyoroti peran kebijakan fiskal dalam pembangunan manusia. Institusi juga dapat menggunakan temuan ini untuk mendorong diskusi akademik terkait hubungan antara belanja pemerintah dan peningkatan kualitas pendidikan serta kesehatan.
- c. Bagi pemerintah & pembuat kebijakan, penelitian ini memberikan informasi empiris mengenai efektivitas belanja pendidikan dan kesehatan dalam meningkatkan pembangunan manusia. Hasilnya dapat dijadikan pertimbangan dalam perumusan kebijakan anggaran yang lebih optimal untuk mendorong pembangunan sosial dan ekonomi secara berkelanjutan.
- d. Bagi user & masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya peran pendidikan dan kesehatan sebagai faktor

utama dalam pembangunan manusia. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi masyarakat untuk lebih aktif memanfaatkan program pemerintah, meningkatkan kesadaran akan investasi jangka panjang melalui pendidikan dan kesehatan, serta berpartisipasi dalam mendukung terciptanya kualitas hidup yang lebih baik.

- e. Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat dalam memperkaya kajian mengenai hubungan antara belanja pemerintah dan pembangunan manusia.



1.5 Struktur Organisasi Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

Bagian pendahuluan menjelaskan mengenai latar belakang dalam melakukan penelitian, masalah dalam penelitian, tujuan dan juga manfaat pada penelitian serta struktur organisasi skripsi.

BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

Bagian kajian pustaka merinci tentang teori-teori yang berhubungan dengan penelitian, kemudian kajian pustaka, kerangka pemikiran serta hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bagian metode ini merinci tentang objek dan subjek, metode penelitian, desain penelitian, operasional variabel, instrumen penelitian, uji instrumen penelitian (validitas, reliabilitas) teknik analisis data, uji hipotesis (uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji t, uji f).

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Bagian hasil yang diperoleh selama penelitian dan pembahasan mengenai hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

Bagian kesimpulan, implikasi dan rekomendasi menjelaskan mengenai kesimpulan dan implikasi dari hasil penelitian, serta memberikan saran kepada beberapa pihak yang terkait.